

	News Title : Bappebti Jalin Kerja Sama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri	
	Media Name : mediaanalisisindonesia.co.id	Journalist : -
	Publish Date : 23 December 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Nasional	Topic : Kerja Sama Dukcapil

Home > Nasional >

Bappebti Jalin Kerja Sama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri

News Friday, 23 December 2022 8 views



Plt Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko (bawa) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (kanan) di Gedung Bappebti Lt. 3, Jl. Kramat Raya No.172, Jakarta Pusat.

Media Analis Indonesia, Jakarta – Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko beserta Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappebti. Perjanjian ini terkait berbagi data. Acara berlangsung pada Kamis sore (22/12/2022) bertempat di Gedung Bappebti Lt 3, Jl. Kramat Raya No.172, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya Didid mengatakan, Bappebti bisa memperoleh, memanfaatkan data, serta informasi kependudukan secara nasional melalui perjanjian kerjasama ini. Dengan begitu transaksi di Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), krypto, Pasar Lelang Komoditas Infrastruktur (PLK) akan lebih transparan.

READ MORE

- Apel Getas Pasukan, Kapoti Perlihatkan Seluruh Pihak Siap Amankan Natuna
- Merke Potihkan bersama Mendagri Tinjar Petyasan Adminkas soal Kanker ke Pulu Ronda dan Selang
- Jenderal Andika dan Lukmanusa Yudo Margono Tandatangani Naskah Sertifikat Pengalihan TMS



"Di sisi lain perlindungan masyarakat semakin bisa terpenuhi. Negara pun bisa segera mengetahui, bisa segera mengidentifikasi jika terjadi penyimpangan," kata Didid.



Didid menambahkan, PKS mengatur lebih khusus layanan perizinan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti serta dalam proses penemuan nasabah dan/atau pelanggan oleh pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti. Hal ini bertujuan mencegah penyimpangan, seperti pencucian uang.

Tantangan dalam era globalisasi dan industri digital ke depannya menempatkan basis teknologi sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan setiap fungsi pengawasan, baik yang bersifat operasional maupun teknis. Oleh karena itu, Bappebti memandang perlu memiliki PKS langsung dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bagi setiap pelaku usaha pun wajib memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan Dirjen Dukcapil dalam rangka hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Hal itu diatur dalam Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan bahwa pengguna pusat dapat mengajukan pemberian hak akses yang tahapannya telah diatur dalam Pasal 7 Permendagri No.102 Tahun 2019. Tahapan tersebut salah satunya memiliki nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Dirjen Dukcapil.



Selanjutnya, ketentuan Pasal 15 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 mempersyaratkan dokumen perizinan usaha sebelum badan hukum Indonesia dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan Dirjen Dukcapil dalam rangka hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.

"Diharapkan dengan PKS ini, kependudukan dapat mendukung perkembangan layanan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Selain itu, seluruh jajaran bursa berjangka, lembaga kliring, dan asosiasi yang hadir diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung implementasi PKS ini dan dapat menginformasikan kepada seluruh anggotanya," ucap Didid.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasi untuk penandatanganan PKS tersebut. "Data kependudukan dapat digunakan untuk verifikasi. Kemendagri berkomitmen terus memperbaiki data kependudukan agar tetap jelas dan bersih," pungkas Zudan. ("Hel)

Bappebti Didid Noordiatmoko Dirjen Dukcapil Kemendagri